

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI
HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS
WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2015**

RAHMAWATI

110462201146



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TAHUN 2017

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Rahmawati
NIM : 110462201146
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.

Telah berhasil dipertahankan di depan dosen penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Menyetujui,




Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Fatahurrazak, SE, Ak, M, Ak, CA
NIDN. 1007066701


Jack Febrind Adel, SE, Ak, M, Si, CA
NIDN. 1006027702

Panitia Penguji


Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Fatahurrazak, SE, Ak, M, Ak, CA</u> NIDN. 1007066701	Penguji I		18/12
2. <u>H. Achmad Uzaimi, SE, Ak, MM</u> NIDN. 1001067101	Penguji II		26/12
3. <u>Inge Lengga Sari Munthe, SE, Ak, M, Si, CA</u> NIDN. 1013077402	Penguji III		15/8-12

Tanggal Lulus: 19 Juli 2017

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. H. Muhammad Idris DM, MM, M, Si
NIP. 195812311989031127

Ketua Program Studi Akuntansi

Inge Lengga Sari Munthe, SE, Ak, M, Si, CA
NIDN. 1013077402

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Maritim Raja Ali Haji maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tanjungpinang,
Yang membuat pernyataan,



RAHMAWATI
NIM.110462201146

ABSTRAK

RAHMAWATI, 2017: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 514 Kabupaten dan Kota dan setelah dilakukan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling diperoleh 99 Kabupaten dan Kota yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan anggaran dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara Parsial Berpengaruh terhadap Belanja modal. Hasil penelitian secara simultan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015. Besarnya kemampuan variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah) dalam menjelaskan variabel dependen (Belanja Modal) adalah 40,7% sedangkan sisanya 59,3% dijelaskan oleh faktor yang lain termasuk dalam model penelitian ini.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Sisa lebih Pembiayaan anggaran dan Luas wilayah terhadap Belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015" Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, dan doa dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan tulus ikhlas penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Syafsir Akhlus, M.Sc selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Bapak Drs.H.Muhammad Idris DM,MM,M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau.
3. Ibu Inge Lengga Sari Munthe,SE,Ak,M.Si,CA, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bapak Fatahurazzak,SE,AK,M.Ak,CA selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Jack Febriand Adel,SE,AK,M.Si,CA selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Prima Apriliani Rambe SE,Msi selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
8. Ayah tercinta Muhammad Ali dan ibuku tercinta Almh Kamariah yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat, kasih sayang,

perhatian, dan pengorbanan yang begitu besar secara moral maupun material, serta Kakak-kakakku (Siti Rugayah, Sulung, Safina dan Hanafi) tersayang yang selalu menjadi penyemangat beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat, nasihat, serta doa tiada henti.

9. Untuk orang yang spesial La Suraedi yang selalu setia menemani dan terimakasih untuk doa, dukungan serta pengertiannya.
10. Keluarga Besar Ex-PNPM Kecamatan Gunung Kijang (Samsualang, Rusitasari, Ernawati, M. Kudus, Mulyono dll)
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk memperbaikinya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tanjung Pinang, 19 Juli 2017

RAHMAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Perumusan Masalah.....	4
1.4 Pembatasan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Belanja Modal.....	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.4 Dana Alokasi Umum	15
2.1.5 Dana Bagi Hasil.....	17
2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	22
2.1.7 Luas Wilayah	23
2.2 Review Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	31

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	31
2.4.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.....	31
2.4.3 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	32
2.4.4 Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal	32
2.4.5 Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal.....	33
2.4.6 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	34
2.4 Hipotesis	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup	36
3.2 Metode Penelitian.....	36
3.3 Operasional Variabel Penelitian.....	37
3.3.1 Variabel Dependen	37
3.3.2 Variabel Independen.....	39
3.4 Metode Penentuan Populasi dan Sampel	39
3.4.1 Populasi	39
3.4.2 Sampel	39
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Analisis	41
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	41
3.6.2.1 Uji Normalitas	42
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas.....	43
3.6.2.3 Uji Autokorelasi.....	44
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.6.4 Pengujian Hipotesis	47
3.6.4.1 Uji Secara Parsial (Uji-T)	47
3.6.4.2 Uji Secara Simultan (Uji-F)	48

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	49
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi	50
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	53
4.2.2.1 Uji Normalitas	53
4.2.2.2 Uji Multi Kolonieritas	56
4.2.2.1 Uji Autokorelasi	57
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	58
4.2.3 Pengujian Regresi Linear Berganda	61
4.2.4 Pengujian Hipotesis	64
4.2.4.1 Uji Secara Parsial (Uji-T)	65
4.2.2.2 Uji Secara Simultan (Uji-F)	67
4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)	68
4.2.5 Pembahasan Hasil Analisis Penelitian.....	70
4.2.5.1 Pengaruh PE Terhadap Belanja modal	71
4.2.5.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja modal	72
4.2.5.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja modal	73
4.2.5.1 Pengaruh DBH Terhadap Belanja modal	74
4.2.5.1 Pengaruh SILPA Terhadap Belanja modal	75
4.2.5.1 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja modal	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	77
5.1.1 Keterbatasan Penelitian	78
5.2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.2	Daftar Penelitian Terdahulu	25
4.1	Pengambilan Sampel	50
4.2	Uji Statistik Deskriptif	51
4.3	Uji Normalitas(sebelum data di Log10).....	54
4.4	Uji Normalitas (Setelah data di Log10)	55
4.5	Uji Multikolonieritas	56
4.6	Uji Autokorelasi	57
4.7	Uji Heteroskedastisitas: <i>Spaerman's rho</i>	60
4.8	Uji Regresi Linear Berganda.....	61
4.9	Uji Parsial (Uji T).....	65
4.10	Uji Simultan (Uji F)	68
4.i1	Uji Koefisiendeterminasi (R^2).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran Teoristis.....	30
4.1	Uji Heteroskedastisitas: <i>Scaterplot</i>	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Olahan Data SPSS.....	1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 420 kabupaten dan 94 kota pada tahun 2015. Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Untuk Penyediaan Pelayanan Publik dibutuhkan anggaran di mana anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Menurut UUD No.32 Tahun 2003 adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari Pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan Pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Menurut Berita yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui situs www.BPS.go.id Indonesia merupakan salah satu negara

yang memiliki wilayah yang sangat luas didunia, total luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km² yang mencakup daratan dan lautan. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah 6 negara lainnya, yaitu Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara yang ada di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-2. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Selain sebagai salah satu negara terluas didunia, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terluas didunia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia. Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, karena Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 17.508 pulau. Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh laut atau bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut .

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 sebesar 4,79 persen, terendah selama 6 tahun, demikian menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada Jumat, 5 Februari 2015. Ini adalah kali pertama ekonomi Indonesia berada di bawah 5 persen sejak 2009, ketika terjadi krisis keuangan global. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 mencapai 4,8 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi Kementerian Keuangan sebesar 4,74 persen.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maryadi, 2014 dengan judul “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012” dengan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012, Sedangkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dino Rian Verri Susetyo, 2014 dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum Terhadap Pengalokasian / Anggaran Belanja Modal” dengan hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap terhadap Pengalokasian / Anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul penelitian ”PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?
2. Apakah Pendapatan Asli daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?
3. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?
5. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?
6. Apakah Luas Wilayah Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?
7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015?

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta menghindari kesalahan persepsi, pemahaman peneliti dan permasalahan peneliti agar tidak meluas, maka peneliti memberikan batasan penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Hanya menggunakan Enam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah. Sedangkan variabel dependennya ialah Belanja Modal.

2. Ruang lingkup penelitian adalah Pada Kabupaten dan Kota Di Indonesia Tahun 2015 yang melakukan Laporan Realisasi Keuangan Sesuai dengan SAP.
3. Laporan Realisasi Keuangan Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki SILPA.
4. Laporan Keuangan yang digunakan adalah laporan Triwulan III yang di ambil dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja modal, yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.

4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Luas Wilayah terhadap belanja modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.
7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk Menambah, melengkapi dan sebagai pembanding hasil penelitian sebelumnya.
2. Untuk Menambah Pengetahuan Penulis tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah di kabupaten dan kota di indonesia.
3. Sebagai Referensi dan Informasi bagi Penelitian Selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Terdapat Lima Pengelompokan bab dalam Penulisan Penelitian ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Membahas mengenai tinjauan pustaka yang diawali dengan landasan teori yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian. Hal-hal yang terangkum dalam bab ini antara lain adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen, hasil analisis

data, dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari 5 (lima) kategori utama, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan (kenaikan atau penurunan) produksi hasil barang atau jasa pada suatu daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada daerah tersebut. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi :

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses

pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa, 1995:30).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU terdiri dari Dana Alokasi Umum Untuk Provinsi Dan Dana Alokasi Umum Untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah

kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat empat tahap penghitungan dana alokasi umum yaitu:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya

kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.5 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Dana Bagi Hasil bersumber dari :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum dana bagi hasil pajak adalah:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagi

dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, "penerimaan negara dari PPh WPOPND (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan". Penyaluran DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta dilaksanakan secara triwulan.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya kehutanan ditetapkan sebagai berikut: 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan. Bagian negara dari penerimaan negara iuran penguasaan hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari penerimaan iuran tetap (Land-rent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalti). Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010). Penerimaan iuran tetap (land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (royalti) satu atau lebih bahan galian.

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari: Penerimaan pungutan perusahaan perikanan, Penerimaan pungutan hasil perikanan. Dana bagi hasil perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Bagian daerah dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan sama besar kepada

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dibagi dengan yang bersangkutan. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. DBH Pertambangan Gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130% (seratus tiga puluh persen),

selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula DAU.

Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi pertamina sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) dan kontrak kerjasama selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan

Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

2.1.7 Luas Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung atau laut. Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun provinsi. Luas wilayah sangat erat kaitannya dengan geografis suatu daerah.

Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas didunia, total luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km² yang mencakup daratan dan lautan. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah 6 negara lainnya, yaitu Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara yang ada di Asia, Indonesia berada di peringkat ke-2. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Selain sebagai salah satu negara terluas didunia, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terluas didunia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia

adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia. Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, karena Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 17.508 pulau. Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang terpisah oleh laut atau bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut.

Pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastuktur agar pembangunan tidak tersendat. Infrastruktur di wilayah yang luas berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang dan jasa dan tentunya memperlancar transaksi ekonomi antar daerah.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pengaruh Luas Wiayah terhadap Belanja Modal. Adapun penelitian penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Tahun	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012)	Pengaruh Dana Alokasi Umum ,Dana Alokasi Khusus,Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Pendapatan Asli Daerah - Luas Wilayah Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.
Arbie Gugus Wandira (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Independen: <ul style="list-style-type: none"> - -Pendapatan Asli Daerah - -Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil - Dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

<p>Sheila Ardhan Nuarisa (2013)</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	<p>Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.</p>
<p>Maryadi (2014)</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2012</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Bagi Hasil - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - Luas Wilayah <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	<p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.</p>
<p>Edi Meianto (2014)</p>	<p>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Pendapatan Asli Daerah - Luas Wilayah <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	<p>Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, . Luas Wilayah</p>

			berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
Dino Rian Verri Susetyo (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ,Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran / Belanja Modal	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	Pertumbuhan Ekonomi ,Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2013), Meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.

Arbie Gugus Wandira (2012) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana bagi hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan hasil Penelitian Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus dan Dana bagi hasil Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sheila Ardhian Nuarisa (2003) Meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan hasil Penelitian Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Maryadi (2014) Meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan hasil Penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

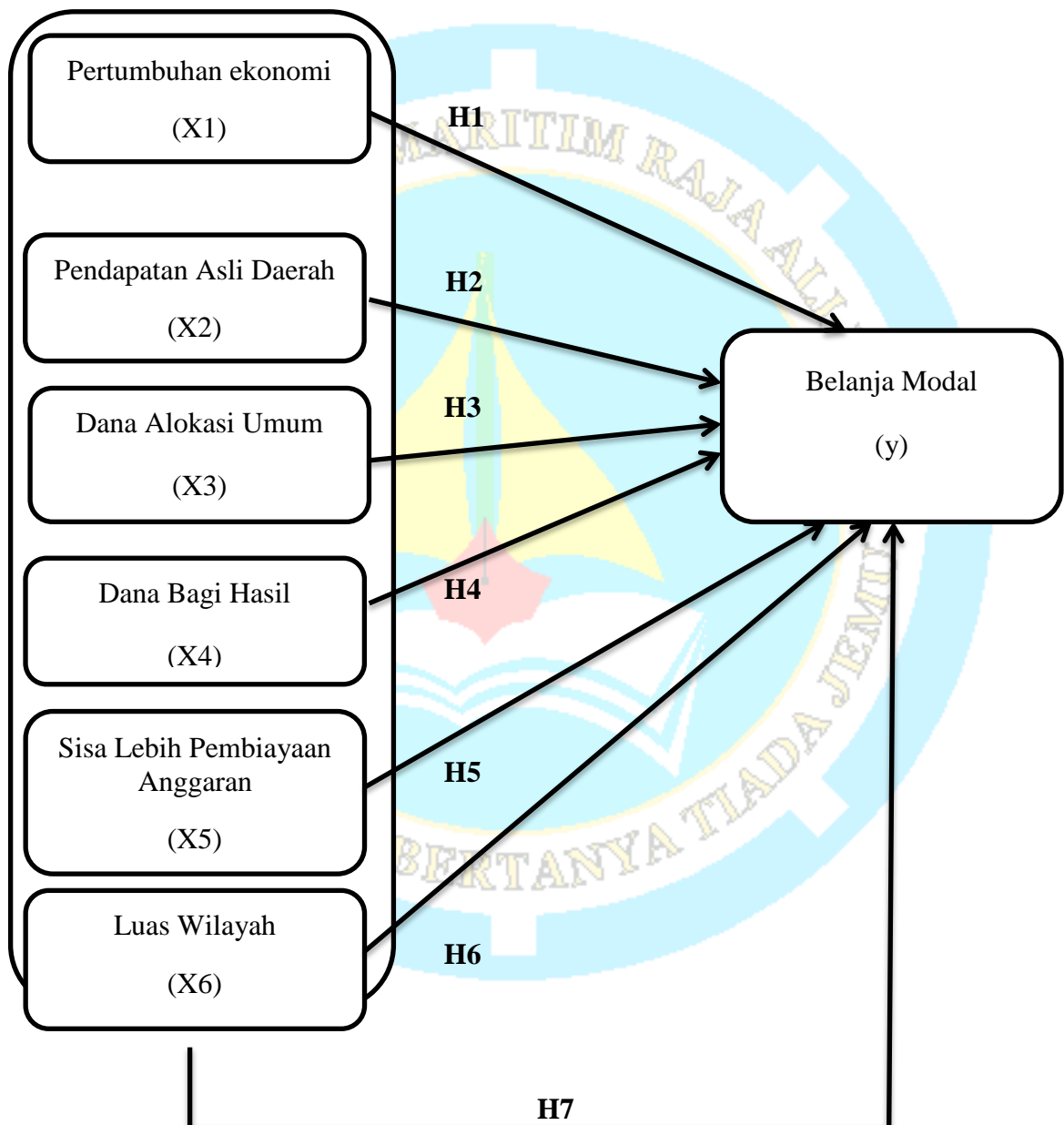
signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

Edi meianto (2014) Meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan hasil Penelitian Secara Parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dino Rian Verri Susetyo (2014) Meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan hasil Penelitian Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka serta mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan (kenaikan atau penurunan) produksi hasil barang atau jasa pada suatu daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dino Rian Verri Sussetyo (2014) Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

H1: ★ Diduga Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012) Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh Pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2013) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi malah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan (DAU). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Menurut Kuncoro (2004) Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam dan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maryadi (2014) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Ini berarti semakin besar Dana Bagi Hasil maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2.4.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal

Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Diduga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2.4.6 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya adalah semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Edi meianto (2014) menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Diduga Luas Wilayah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2.5 HIPOTESIS

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dikembangkan adalah:

H1: Diduga Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H2: Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H3: Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H4: Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H5: Diduga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

H6: Diduga Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H7: Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014 yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan di situs Badan Pusat Statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambar secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana metode kuantitatif yang digunakan karena hubungan perbandingan dapat dianalisis dengan menguji angka-angka dari hasil perhitungan. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian eksplanasi (*explanatory research*). Penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh Enam variabel bebas yaitu Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal yang merupakan variabel terikat.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan teknik estimasi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares – OLS*) untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DBH, SiLPA dan luas wilayah dalam hubungannya dengan alokasi belanja modal.

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan sebagai berikut:

$$y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana:

y = Belanja Modal

α = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Pendapatan Asli Daerah

X3 = Dana Alokasi Umum

X4 = Dana Bagi hasil

X5 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

X6 = Luas Wilayah

e = error

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini ada Enam, pertama (X1) Pertumbuhan ekonomi, kedua (X2) PAD, ketiga (X3) DAU, Keempat (X4) DBH, Kelima (X5) SILPA, Keenam (X6) Luas wilayah.

3.4 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Arikunto (2010:130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berjumlah 514 Kabupaten dan Kota pada Tahun 2015.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2006:131). Sampel penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015
2. Kabupaten dan kota yang memasukkan data Laporan realisasi APBD di Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah daerah tahun 2015.
3. Kabupaten dan Kota yang membuat Laporan Realisasi APBD dalam format SAP
4. Kabupaten dan Kota yang memiliki SILPA.
5. Laporan Keuangan yang diunakan adalah Laporan Triwulan III.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Indonesia yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Data Luas Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi

Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di www.kemendagri.go.id dan www.BPS.go.id

3.6 Metode Analisis

Analisis data merupakan bagian dimana data yang telah diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa uji untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dijadikan untuk menarik kesimpulan dari sebuah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif , uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis (uji t, uji f, dan koefisien determinasi).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel Kabupaten/Kota di Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Indonesia yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambar secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian data dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap 4 asumsi klasik, yaitu: normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Semua pengujian akan diperoleh dengan menggunakan SPSS (*statistical package for social science*).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Santoso (2014: 183) Normalitas, yakni nilai dari Y (variabel dependen) seharusnya didistribusikan secara normal terhadap nilai X (variabel independen).

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai variabel independen dan variabel dependen mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tersebut dilanggar maka uji statistik menjadi valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apa variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013: 160).

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, tetapi secara statistik dapat menjadi sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan selain menggunakan uji grafik dilengkapi juga dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji

normalitas variabel independen dan variabel dependen adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov (KS), yaitu:

1. Nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.
2. Nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (2014: 183) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (*Multiko*).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur besar korelasi antarvariabel independen; jika dua variabel independen terbukti berkorelasi secara kuat, maka dikatakan terdapat multikolinieritas pada kedua variabel tersebut.

Menurut Ghozali (2013:105), untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Sebaliknya Apabila nilai tolerance $> 0,10$ mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas, sedangkan untuk nilai $VIF < 10$ menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi


Menurut Santoso (2014:183) Autokorelasi, yaitu terjadinya gangguan terhadap data yang bersifat time series (data berdasar waktu). Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Secara Praktis bisa dikatakan bahwa nilai residu yang ada tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi bisa diambil patokan sebagai berikut (Santoso, 2014: 193):

- Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka DW di antara -2 sampai $+2$, berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka DW di atas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di- studentized. Dasar analisis menurut Ghozali (2013: 139):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik - titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi  heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik - titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2013:141), analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistic yang dapat lebih menjamin keakuratan hasil. Sehingga dalam penelitian ini juga melakukan pengujian dengan menggunakan uji spermen's rho. Menurut Priyatno (2010:84), uji spermen's rho adalah mengkorelasi nilai residual (*unstandardized residual*) dengan masing-masing variabel independen, dengan

ketentuan jika signifikan korelasi $< 0,05$ maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen, digunakan persamaan regresi berganda (*multiple linear regression method*). Teknik analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah) terhadap variabel terikat (Belanja modal) baik secara simultan maupun parsial. Menurut Priyatno (2010:61) rumus regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Koefisien Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = PE

X₂ = PAD

X₃ = DAU

X4 = DBH

X 5 = SILPA

X 6 = Luas Wilayah

E =Estimasi Error

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel independen, yaitu (X1) PE,(X2) PAD (X3) DAU, (X4) DBH, (X5)SILPA, (X6) Luaswilayah, terhadap Belanja Modal (Y).Dasar pengambilan keputusan (Priyatno, 2010:69):

1. Jika $-t_{table} \leq t_{hitung} \leq t_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti bahwa variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti bahwa variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

Selain dengan melihat t hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari signifikannya. Jika nilai signifikannya $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a

ditolak, sebaliknya jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.6.4.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui fit atau tidaknya model yang diuji dan tidak digunakan untuk mengetahui hipotesis. Apabila terdapat satu dari variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen maka model itu dikatakan fit. Menentukan F tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikan $0,05$ dengan $df = (n-k-1)$. Dasar pengambilan keputusan (Priyatno, 2010:67):

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak berarti bahwa variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima berarti bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Selain dengan melihat F_{hitung} , pengambilan keputusan dapat juga dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan $>$ dari $\alpha=0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak, yang artinya secara simultan variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan $<$ dari $\alpha=0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara simultan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah biasterhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Analisis / Observasi

Berdasarkan pada tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini, maka dari 514 kabupaten dan kota di indonesia tahun 2015 yang memenuhi semua kriteria sebanyak 99 kabupaten dan kota. Adapun Penyeleksian sampel berdasarkan kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten dan Kota di indonesia Tahun 2015	514
2.	Kabupaten dan Kota yang tidak memasukkan data laporan Realisasi APBD kedalam situs DPJK	(317)
3.	Kabupaten dan Kota yang tidak membuat laporan Realisasi APBD dalam Format SAP	(30)
4.	Kabupaten dan kota yang tidak memiliki SILPA	(68)
	Jumlah sample Penelitian	99

Dari hasil pengambilan Sampel terdapat sebanyak 99 sampel dalam penelitian ini.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi bagaimana hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis deskriptif meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	99	28.160.321.408	1.229.842.874.668	215.059.567.644	178.744.617.029
PE	99	2,13	7,98	5,2748	1,10076
PAD	99	3.242.871.582	1.250.189.596.402	207.780.168.263	220.334.173.573
DAU	99	87.235.600.000	1.631.282.310.000	522.480.727.654	242.963.271.093
DBH	99	4.798.838.350	1.513.014.440.266	106.988.451.247	227.335.301.992
SILPA	99	1.684.120.807	6.849.172.917.636	236.491.283.591	693.211.644.942
LUAS	99	153	2.163.820	298.757	359.707
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Luas Dalam Km²

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 99 data sampel. Dari hasil statistik deskriptif tersebut dilihat bahwa:

Variabel Belanja Modal (BM) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 28.160.321.408 di Kabupaten Gorontalo, nilai maximum sebesar 1.229.842.874.668 di Kota Samarinda, nilai mean sebesar 215.059.676.444 dan nilai standard deviation sebesar 178.744.617.029.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 2,13 di Kabupaten Lahat, nilai maximum sebesar 7,98 di Kota Kendari, nilai mean sebesar 5,2748 dan nilai standard deviation sebesar 1,10076.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 3.242.871.582 di Kabupaten Dogiyai, nilai maximum sebesar 1.250.189.596.402 di Kabupaten Bandung, nilai mean sebesar 207.780.168.263 dan nilai standard deviation sebesar 220.334.173.573.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 87.235.600.000 di Kota Bontang, nilai maximum sebesar 1.631.282.310.000 di Kabupaten Bandung, nilai mean sebesar 522.480.727.653 dan nilai standard deviation sebesar 242.963.271.092.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 4.798.838.350 di Kabupaten Sabu Rajjua, nilai maximum sebesar 1.513.014.440.266 di Kabupaten Musi Banyuasin, nilai mean sebesar 106.988.451.246 dan nilai standard deviation sebesar 227.335.301.991.

Variabel Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 1.684.120.807 di Kabupaten Gowa, nilai maximum sebesar 6.849.172.917.636 di Kabupaten Sekadau, nilai mean sebesar 236.491.283.590 dan nilai standard deviation sebesar 693.211.644.941.

Variabel Luas wilayah (Luas) dengan nilai $n = 99$ memiliki nilai minimum sebesar 153 di Kota Sabang, nilai maximum sebesar 2.163.820 di Kabupaten Sintang, nilai mean sebesar 298.757 dan nilai standard deviation sebesar 359.707.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah model regresi dalam variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai variabel independent dan variabel dependent mengikuti distribusi normal. Jika asumsi itu di langgar maka uji statistik menjadi valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:160). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik kolmogrov-smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan hipotesis:

H_0 : Data Residual berdistribusi normal

H_a : Data Residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas (Sebelum Data di Transformasi ke Logaritma)

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000430
	Std. Deviation	140.744.930.651
Most Extreme Differences	Absolute	,164
	Positive	,164
	Negative	-,145
Test Statistic		,164
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

Berdasarkan hasil tabel diatas, terlihat bahwa hasil nilai kolmogorov smirnov (K-S) adalah 0,164 dan signifikan 0,000. Karena lebih kecil dari α ($\alpha=0,05$) yaitu $0,000 < 0,05$, untuk BM, PE, PAD, DAU, DBH, SILPA dan Luas maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan data dari ketujuh variabel tersebut tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi data yang tidak normal maka dilakukan transformasi data dengan mentransformasi variabel dependent dan independent menjadi bentuk Logaritma (Log) agar model regresi yang digunakan menghasilkan nilai yang sesuai dan memenuhi syarat – syarat uji asumsi klasik, analisis regresi linear serta pengujian hipotesis. Uji normalitas setelah data di transformasi ke logaritma (Log) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas (Sesudah Data di Transformasi ke Logaritma)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	22061820
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,044
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan hasil tabel diatas, terlihat bahwa hasil nilai kolmogorov smirnov (K-S) adalah 0,055 dan signifikan 0,200. Karena lebih besar dari α ($\alpha=0,05$) yaitu $0,055 > 0,05$, untuk BM, PE, PAD, DAU, DBH, SILPA dan Luas. Dengan demikian dapat dinyatakan data dari ketujuh variabel tersebut berdistribusi normal sehingga layak untuk memakai analisis regresi linear berganda.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *VIF* yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Log_PE	,815	1,169
Log_PAD	,469	2,215
Log_DAU	,612	1,693
Log_DBH	,602	1,618
Log_SILPA	,808	1,273
Log_LUAS	,755	1,388

a. Dependent Variable: Log_BM

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.5, nilai *Variance inflation factor (VIF)* diketahui nilai VIF untuk semua variabel independent ≤ 10 . Dimana nilai VIF untuk H1 (Log_PE) = 1,227, H2 (Log_PAD) = 2,132, H3 (Log_DAU) = 1,635, H4 (Log_DBH) = 1,662, H5 (Log_SILPA) = 1,238, H6 (Log_Luas) = 1,324. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah

multikolonieritas antara variabel independen yang artinya layak untuk menggunakan model analisis regresi berganda.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pola pada suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan perhitungan statistik untuk uji ini yaitu dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) sebagai berikut:

Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a. Bila angka DW -2 berarti ada autokorelasi yang positif
- b. Bila angka DW -2 sampai dengan $+2$ berarti tidak ada autokorelasi
- c. Bila angka DW $+2$ berarti ada autokorelasi negative

Tabel 4.6
Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,666 ^a	,444	,407	,22770	1,701

a. Predictors: (Constant), Log_LUAS, Log_PE, Log_DAU, Log_SILPA, Log_DBH, Log_PAD

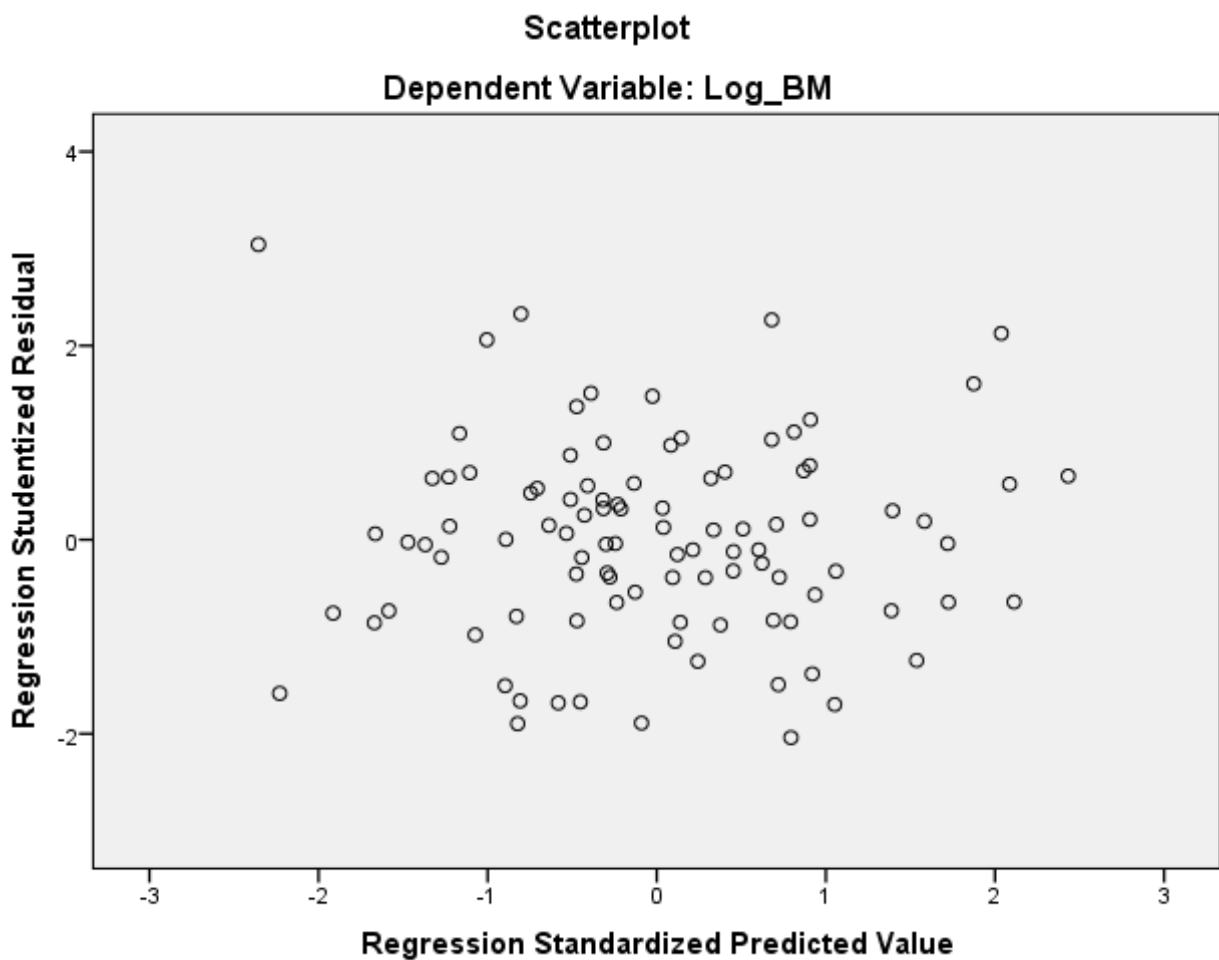
b. Dependent Variable: Log_BM

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.6, nilai DW untuk model ini adalah 1,701, maka dapat disimpulkan angka DW berada di antara -2 sampai $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif atau tidak terdapat autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik *scatterplot* yaitu seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan *scatter plot*

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22

Dari grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja modal berdasarkan masukan variabel independen PE,PAD, DAU ,DBH, SILPA dan Luas Wilayah.

Menurut Ghozali (2013:141), analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Sebab itu diperlukan uji statistik yang dapat lebih menjamin keakuratan hasil. Sehingga dalam penelitian ini juga melakukan pengujian dengan menggunakan uji *Spearman's rho*.

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan bantuan program spss V.22 dapat dilihat pada tabel Uji *Spearman's rho* sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji heteroskedastisitas (menggunakan Uji Rank Spearman's rho)

Correlations			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1,000 99
	Log_PE	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	-,027 ,793 99
	Log_PAD	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	,035 ,734 99
	Log_DAU	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	,043 ,671 99
	Log_DBH	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	-,038 ,710 99
	Log_SILPA	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	,014 ,892 99
	Log_LUAS	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	-,005 ,959 99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Output SPSS Versi 22

Berdasarkan output tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya heteroskedastisitas. Setelah model regresi memenuhi keempat

uji asumsi klasik maka dapat dilakukan uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

4.2.3 Pengujian Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Hasil dari analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,970	1,545		1,275	,206
Log_PE	-,019	,160	-,010	-,120	,905
Log_PAD	-,152	,073	-,242	-2,091	,039
Log_DAU	,586	,143	,414	4,088	,000
Log_DBH	,387	,058	,657	6,646	,000
Log_SILPA	-,011	,052	-,018	-,211	,834
Log_LUAS	,025	,037	,061	,671	,504

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Log BM} = 1,970 - 0,019\text{LogPE} - 0,152\text{LogPAD} + 0,586\text{LogDAU} + 0,387\text{LogDBH} - 0,011\text{LogSILPA} + 0,025\text{LogLuas} + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

Nilai Konstansta (α) sebesar 1,970, menunjukkan bahwa jika LogPE, LogPAD, LogDAU, LogDBH, LogSILPA dan LogLUAS bernilai 0 atau ditiadakan, maka anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015 meningkat sebesar 1,97% atau meningkat sebesar Rp.1.970,-

Nilai koefisien regresi variabel LogPE sebesar - 0,019, koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi artinya jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan sebesar 1,9%, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau Jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami Peningkatan sebesar Rp.1.000,- maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar Rp.1.900,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel LogPAD adalah - 0,152. Nilai LogPAD yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan PAD yang artinya jika PAD mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan sebesar 15,2% , dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan sebesar Rp.15.200,-, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel LogDAU adalah 0,586 Nilai LogDAU yang Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja

Modal dengan DAU yang artinya jika DAU mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 58,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika DAU mengalami peningkatan Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar Rp.58.600,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel LogDBH adalah 0,387 Nilai Log DBH yang Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah arah antara variabel Belanja Modal dengan DBH yang artinya jika DBH mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar 38,7% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika DBH mengalami peningkatan Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar Rp.38.700,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel LogSILPA adalah -0,011 Nilai LogSILPA yang Negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan SILPA yang artinya jika SILPA mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 1,1% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika SILPA mengalami peningkatan Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar Rp.1.100,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel LogLUAS adalah 0,025 Nilai LogLUAS yang Positif menunjukkan adanya hubungan yang Searah antara variabel Belanja Modal dengan Luas yang artinya jika Luas Wilayah mengalami peningkatan 1%

maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar 2,5% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika Luas Wilayah mengalami peningkatan Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar Rp.2.500,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji T (Uji Secara Parsial)

Secara Parsial, Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Dasar pengambilan keputusan (Priyatno, 2010:69):

1. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti bahwa variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

Selain dengan melihat t_{hitung} -nya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari signifikansinya. Jika nilai signifikannya $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sebaliknya jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak

terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Uji Parsial (T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,970	1,545		1,275	,206
Log_PE	-,019	,160	-,010	-,120	,905
Log_PAD	-,152	,073	-,242	-2,091	,039
Log_DAU	,586	,143	,414	4,088	,000
Log_DBH	,387	,058	,657	6,646	,000
Log_SILPA	-,011	,052	-,018	-,211	,834
Log_LUAS	,025	,037	,061	,671	,504

Dari hasil pengujian diatas maka:

Pertumbuhan ekonomi (LogPE) terhadap Belanja Modal (LogBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,905 > 0,05$ dan t hitung = $-0,120$ dan t tabel = $-1,66177$, jadi $-t$ hitung $> -t$ tabel ($-0,120 > -1,66177$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi (LogPE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (LogBM).

Pendapatan asli daerah (LogPAD) terhadap Belanja Modal (LogBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$ dan t hitung = $-2,091$ dan t tabel = $-1,66177$, jadi $-t$ hitung $< -t$ tabel ($-2,091 < -1,66177$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan Pendapatan asli daerah (LogPAD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal (LogBM).

Dana Alokasi Umum (LogDAU) terhadap Belanja Modal (LogBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung = 4,088 dan t tabel = 1,66177, jadi t hitung $>$ t tabel ($4,088 > 1,66177$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi umum (LogDAU) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal (LogBM).

Dana Bagi Hasil (LogDBH) terhadap Belanja Modal (LogBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung = 6,646 dan t tabel = 1,66177, jadi t hitung $>$ t tabel ($6,646 > 1,66177$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan Dana bagi hasil (LogDBH) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal (LogBM).

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (LogSILPA) terhadap Belanja Modal (LogBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,834 > 0,05$ dan t hitung = -0,211 dan t tabel = -1,66177, jadi $-t$ hitung $>$ $-t$ tabel ($-0,211 > -1,66177$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan Sisa lebih pembiayaan anggaran (LogSILPA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal (LogBM).

Luas Wilayah (LogLuas) terhadap Belanja Modal (LogBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,504 > 0,05$ dan t hitung = 0,671 dan t tabel = 1,66177, jadi t hitung $<$ t tabel ($0,671 < 1,66177$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan Luas wilayah (LogLuas) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal (LogBM).

4.2.4.2 Uji f (Uji simultan)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui fit atau tidaknya model yang diuji dan tidak digunakan untuk mengetahui hipotesis. Apabila terdapat satu dari variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen maka model itu dikatakan fit. Menentukan F tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikan 0,05 dengan $df = (n-k-1)$. Dasar pengambilan keputusan (Priyatno, 2010:67):

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti bahwa variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Selain dengan melihat F hitung, Pengambilan keputusan dapat juga dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan $>$ dari $\alpha=0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya secara simultan variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikannya $<$ dari $\alpha=0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara simultan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.10

Uji simultan (F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,803	6	,634	12,228	,000 ^b
Residual	4,769	92	,052		
Total	8,572	98			

a. Dependent Variable: Log_BM

b. Predictors: (Constant), Log_LUAS, Log_PE, Log_DAU, Log_SILPA, Log_DBH, Log_PAD

Dari hasil penelitian diatas diperoleh F hitung sebesar 12,228 dan F tabel sebesar 2,20. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel (12,228 > 2,20). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima artinya Pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana bagi hasil (DBH), Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan Luas wilayah (Luas) secara bersama – sama berpengaruh terhadap belanja modal (BM).

4.2.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4.11

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,666 ^a	,444	,407	,22770	1,701

a. Predictors: (Constant), Log_LUAS, Log_PE, Log_DAU, Log_SILPA, Log_DBH, Log_PAD

b. Dependent Variable: Log_BM

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan dimana nilai R 0,666 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Belanja modal (BM) dengan Pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana bagi hasil (LnDBH), Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan Luas wilayah (Luas) mempunyai tingkat hubungan yang kuat yaitu sebesar 66,6%.

Nilai *Adjust R-Square* dari tabel diatas adalah 0,407, ini berarti menunjukkan bahwa variasi dari variabel Pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana bagi hasil (DBH), Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan Luas wilayah (Luas) hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 40,7% sisanya sebesar 59,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti.

4.2.5 Pembahasan Hasil Analisis Penelitian

Dari hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F tingkat signifikannya $\alpha=5\%$ menunjukkan hasil uji F test bahwa nilai F hitung sebesar 12,228 dengan nilai signifikansi 0,000. Dicari dengan jumlah sampel $(n)=99$, jumlah variabel $(k)=6$, tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, *degree of freedom* $(df1)=k=6$ dan $df2=n-k-1=99-6-1=92$. Dari data tersebut diperoleh nilai F tabel sebesar 2,20 (taraf signifikansi $\alpha=5\%$). Berdasarkan hasil F hitung $>$ F tabel ($12,228 > 2,20$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan diketahui bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana bagi hasil (DBH), Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan Luas wilayah (Luas) mempunyai pengaruh terhadap Belanja modal (BM) pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015 pada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti semakin besar Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DBH, SILPA serta semakin luas wilayah secara bersama-sama (simultan) maka semakin besar pula peningkatan jumlah Belanja Modal. Jika PE, PAD, DAU, DBH, SILPA dan Luas Wilayah mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan meningkatnya alokasi Belanja Modal pada Kabupaten dan kota di Indonesia.

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia 2015

Dari pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh terhadap Belanja modal (BM). Hal ini dapat dilihat pada uji t dimana hasil uji statistik tersebut menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,905 > 0,05$ dan t hitung = $-0,120$ dan t tabel = $1,66177$, jadi $-t$ hitung $>$ $-t$ tabel ($-0,120 > -1,66177$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi (PE), Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015.

Jika dilihat berdasarkan uji regresi linear berganda dalam tabel 4.9, nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar $-0,019$, koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi artinya jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan sebesar 1,9%, dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. Hal ini bermakna bahwa semakin besar Pertumbuhan ekonomi maka Belanja Modal di kabupaten dan kota menurun atau Jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami Peningkatan sebesar Rp.1.000,- maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar Rp.1.900,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dino Rian Verri Sussetyo (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal.

4.2..2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia 2015

Dari pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Pendapatan asli daerah (LnPAD) terhadap Belanja Modal (LnBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} = -2,091$ dan $t \text{ tabel} = -1,66177$, jadi $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ ($-2,091 < -1,66177$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan Pendapatan asli daerah (LnPAD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal (LnBM) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.

Nilai koefisien regresi variabel LnPAD adalah $-0,152$. Nilai LnPAD yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan PAD yang artinya jika PAD mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan sebesar 15,2% , dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar PAD sebagai sumber penerimaan daerah maka dana yang dikeluarkan untuk belanja modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia menurun atau jika PAD mengalami Peningkatan sebesar Rp.1000,- maka Belanja Modal akan mengalami Penurunan sebesar Rp.15.200,- dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik siswantoro (2012) yang menyatakan bahwa Besar nya Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli daerah.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia 2015

Pengujian Dana Alokasi Umum (LnDAU) terhadap Belanja Modal (LnBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung = 4,088 dan t tabel = 1,66177, jadi t hitung $>$ t tabel ($4,088 > 1,66177$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi umum (LnDAU) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal (LnBM) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.

Nilai koefisien regresi variabel LnDAU adalah 0,586 Nilai LnDAU yang Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAU yang artinya jika DAU mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 58,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika DAU mengalami peningkatan Rp.1000,- maka belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar Rp.58.600,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar DAU maka semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) yang menyatakan bahwa Belanja Modal akan sangat dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum.

4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015

Hasil uji Dana Bagi Hasil (LnDBH) terhadap Belanja Modal (LnBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung = 6,646 dan t tabel = 1,66177, jadi t hitung $>$ t tabel ($6,646 > 1,66177$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan Dana bagi hasil (LnDBH) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal (LnBM) Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.

Nilai koefisien regresi variabel LnDBH adalah 38,7 Nilai Ln DBH yang Positif menunjukkan adanya hubungan yang searah arah antara variabel Belanja Modal dengan DBH yang artinya jika DBH mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar 38,7% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika DBH mengalami peningkatan Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar Rp.38.700,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar DBH maka semakin besar belanja modal yang di keluarkan oleh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Maryadi (2014) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4.2.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015

Hasil uji hipotesis Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (LnSILPA) terhadap Belanja Modal (LnBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,834 > 0,05$ dan t hitung = $-0,211$ dan t tabel = $-1,66177$, jadi $-t$ hitung $> -t$ tabel ($-0,211 > -1,66177$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan Sisa lebih pembiayaan anggaran (LnSILPA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal (LnBM) Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.

Nilai koefisien regresi variabel LnSILPA adalah $-0,011$ Nilai LnSILPA yang Negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan SILPA yang artinya jika SILPA mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 1,1% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika SILPA mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar Rp.1.100,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar SILPA maka semakin kecil belanja modal yang di keluarkan oleh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015.

Hal ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

4.2.6 Pengaruh Luas Wilayah (LUAS) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015

Hasil uji hipotesis Luas Wilayah (LnLuas) terhadap Belanja Modal (LnBM) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,504 > 0,05$ dan t hitung = $0,671$ dan t tabel = $1,66177$, jadi t hitung $< t$ tabel ($0,671 < 1,66177$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan Luas wilayah (LnLuas) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal (LnBM) Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.

Nilai koefisien regresi variabel LnLUAS adalah $0,025$ Nilai LnLUAS yang Positif menunjukkan adanya hubungan yang Searah antara variabel Belanja Modal dengan Luas yang artinya jika Luas Wilayah mengalami peningkatan 1% maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar $2,5\%$ dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap atau jika Luas Wilayah mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000,- maka Belanja Modal akan mengalami Peningkatan sebesar Rp.2.500,- dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar Luas Suatu Wilayah daerah maka semakin besar belanja modal yang di keluarkan oleh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015.

Hal ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Edi Meianto (2014) yang menyatakan bahwa Luas Wilayah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir pembahasan hasil analisis mengenai pengaruh Pertumbuhan ekonomi (PE), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana bagi hasil (DBH), Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan Luas wilayah (Luas) terhadap Belanja modal (BM). Analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.

6. Luas Wilayah (LUAS) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.
7. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2015.

5.1.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mencoba memberikan penjelasan pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015. Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sampel Laporan realisasi anggaran yang digunakan hanya satu tahun saja yaitu tahun 2015, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.
2. Penelitian ini hanya melihat pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015.
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal

pada Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2015 secara bersama – sama hanya terbatas sebesar 40,7% sehingga perlu dicari variabel lain yang mempengaruhi belanja modal diluar model ini.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan data dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian.
4. Dalam kajian Belanja Modal Daerah yang akan datang agar diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/619/835>
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit – Undip.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro, 2012. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Maryadi, 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Universitas Maritim Indonesia*.
- Meianto, Edi. 2014. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Syofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Prenamedia group.

Verri, Rian Dino. 2014. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ,Pendapatan Asli Daerah(PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014*.

Wandira, Arbie Gugus. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013)*.

www.anggaran.depkeu.go.id

www.BPS.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.kemendagri.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Olahan Data SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	99	28.160.321.408	1.229.842.874.668	215.059.567.644	178.744.617.029
PE	99	2,13	7,98	5,2748	1,10076
PAD	99	3.242.871.582	1.250.189.596.402	207.780.168.263	220.334.173.573
DAU	99	87.235.600.000	1.631.282.310.000	522.480.727.654	242.963.271.093
DBH	99	4.798.838.350	1.513.014.440.266	106.988.451.247	227.335.301.992
SILPA	99	1.684.120.807	6.849.172.917.636	236.491.283.591	693.211.644.942
LUAS	99	153	2.163.820	298.757	359.707
Valid N (listwise)	99				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas (Sebelum Data di Transformasi ke Log10)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000430
	Std. Deviation	140.744.930.651
Most Extreme Differences	Absolute	,164
	Positive	,164
	Negative	-,145
Test Statistic		,164
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

Hasil Uji Normalitas (Setelah Data di Transformasi ke Log10)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	22061820
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,044
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 22

b. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Log_PE	,815	1,169
Log_PAD	,469	2,215
Log_DAU	,612	1,693
Log_DBH	,602	1,618
Log_SILPA	,808	1,273
Log_LUAS	,755	1,388

a. Dependent Variable: Log_BM

c. Uji Autokorelasi

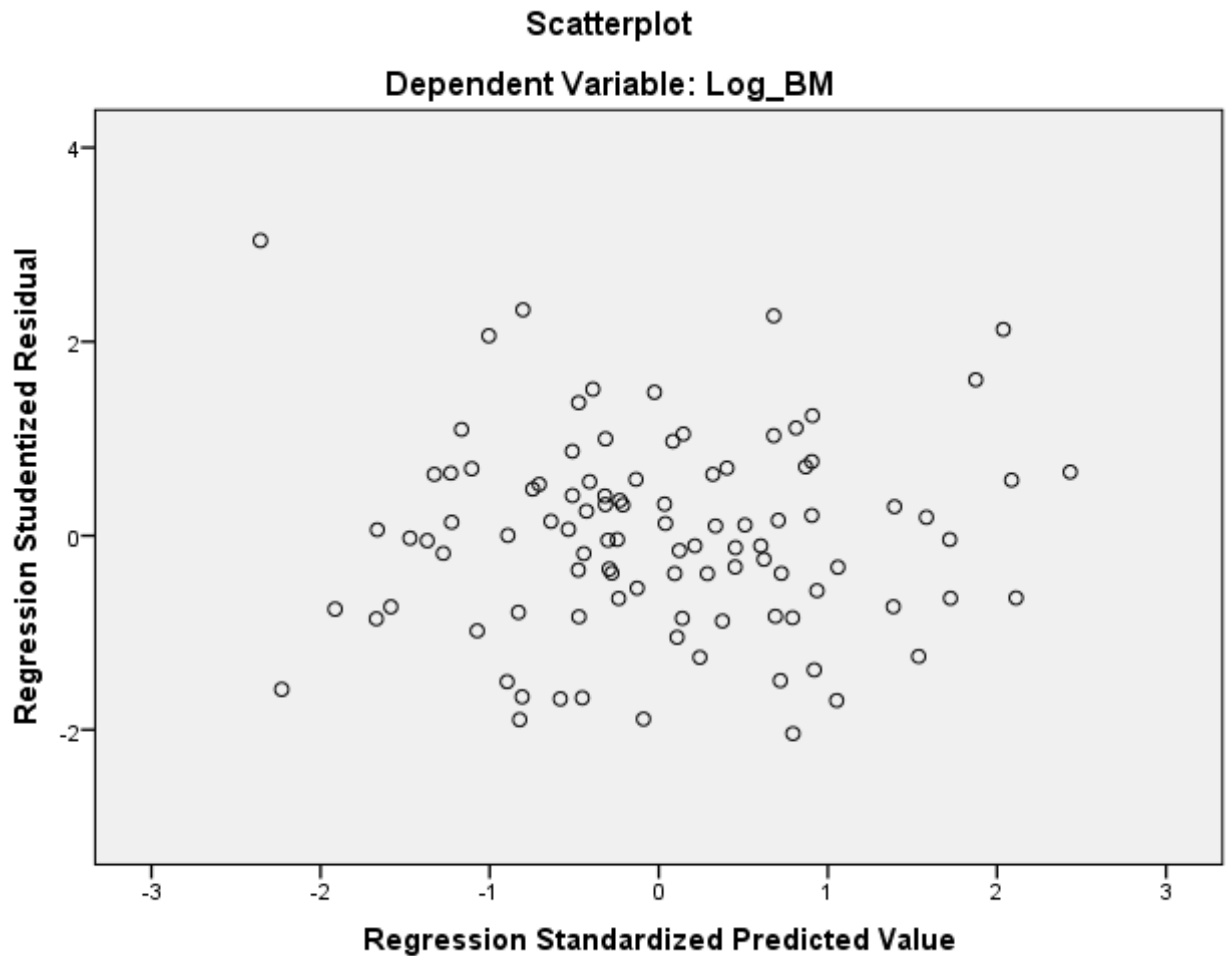
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,666 ^a	,444	,407	,22770	1,701

a. Predictors: (Constant), Log_LUAS, Log_PE, Log_DAU, Log_SILPA, Log_DBH, Log_PAD

b. Dependent Variable: Log_BM

d. Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas(Menggunakan Uji Rank Sperman's rho)

Correlations

			Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000	
		Sig. (2-tailed)		
		N	99	
		Log_PE	Correlation Coefficient	-,027
		Sig. (2-tailed)	,793	
		N	99	
		Log_PAD	Correlation Coefficient	,035
		Sig. (2-tailed)	,734	
		N	99	
Log_DAU	Correlation Coefficient	,043		
Sig. (2-tailed)	,671			
N	99			
Log_DBH	Correlation Coefficient	-,038		
Sig. (2-tailed)	,710			
N	99			
Log_SILPA	Correlation Coefficient	,014		
Sig. (2-tailed)	,892			
N	99			
Log_LUAS	Correlation Coefficient	-,005		
Sig. (2-tailed)	,959			
N	99			

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,970	1,545		1,275	,206
Log_PE	-,019	,160	-,010	-,120	,905
Log_PAD	-,152	,073	-,242	-2,091	,039
Log_DAU	,586	,143	,414	4,088	,000
Log_DBH	,387	,058	,657	6,646	,000
Log_SILPA	-,011	,052	-,018	-,211	,834
Log_LUAS	,025	,037	,061	,671	,504

4. Uji Hipotesis:

a. Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,970	1,545		1,275	,206
Log_PE	-,019	,160	-,010	-,120	,905
Log_PAD	-,152	,073	-,242	-2,091	,039
Log_DAU	,586	,143	,414	4,088	,000
Log_DBH	,387	,058	,657	6,646	,000
Log_SILPA	-,011	,052	-,018	-,211	,834
Log_LUAS	,025	,037	,061	,671	,504

b. Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,803	6	,634	12,228	,000 ^b
Residual	4,769	92	,052		
Total	8,572	98			

a. Dependent Variable: Log_BM

b. Predictors: (Constant), Log_LUAS, Log_PE, Log_DAU, Log_SILPA, Log_DBH, Log_PAD

c. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,666 ^a	,444	,407	,22770	1,701

a. Predictors: (Constant), Log_LUAS, Log_PE, Log_DAU, Log_SILPA, Log_DBH, Log_PAD

b. Dependent Variable: Log_BM

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahmawati dilahirkan di Kawal pada tanggal 11 Oktober 1988 dari ayah yang bernama Muhammad Ali dan ibu bernama Kamariah. Penulis merupakan anak Bungsu dari Lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri

006 Gunung Kijang lulus pada tahun 2000. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Gunung Kijang lulus pada tahun 2003 Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK N 2 Tanjung Pinang dan lulus pada tahun 2006. Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan Kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi dan lulus pada tanggal 19 Juli 2017.